



KLIPING MEDIA MASSA TAHUN 2019
BPK PERWAKILAN PROVINSI BANTEN RI

1.	RADAR BANTEN	4.	SATELIT NEWS
2.	BANTEN POS		
3.	KABAR BANTEN		

JANUARI	MEI	10 SEPTEMBER	2019
FEBRUARI	JUNI	OKTOBER	
MARET	JULI	NOVEMBER	
APRIL	AGUSTUS	DESEMBER	



AUDIENSI: Sejumlah masyarakat Kecamatan Padarincang beraudiensi dengan jajaran Kementerian ESDM dan kepolisian usai melakukan aksi *long march* dari Serang di depan halaman kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/9).

Proyek Geotermal Bakal Dievaluasi Pusat

SERANG - Proyek geotermal di Kecamatan Padarincang kabarnya bakal dievaluasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI. Hal itu berdasarkan hasil audiensi masyarakat Kecamatan Padarincang dengan Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM FX Sutijastoto di depan halaman kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (9/9).

Sebelumnya, sejumlah mahasiswa dan masyarakat Kecamatan Padarincang melakukan aksi *long march*

dari Serang menuju Jakarta sejak Sabtu (7/9) dan tiba di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, pada Senin (9/9). Massa langsung diterima dengan baik oleh jajaran kementerian dan melakukan audiensi yang dikawal ketat puluhan aparat kepolisian.

Dalam audiensinya, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM FX Sutijastoto berjanji, pihaknya akan mengevaluasi proyek geotermal di Banten. Bahkan, siap mencabut izinnya jika lebih banyak dampak negatif terhadap masyarakat sekitar proyek, walaupun hasil kajian kami bahwa potensi panas bumi di

Banten cukup besar dan energi panas bumi ramah lingkungan karena energi terbarukan dan berkelanjutan.

"Kami (Dirjen) akan berkunjung ke Padarincang tanggal 17 September. Kami juga akan memanggil Pemprov Banten, Pemkab, dan pihak perusahaan untuk duduk bareng bersama masyarakat," janjinya di hadapan massa dalam siaran pers yang disampaikan salah satu perwakilan masyarakat yang mengikuti aksi ke Jakarta.

Sementara itu, tokoh pemuda Kecamatan Padarincang Ikhtimaludin mendesak, Kementerian ESDM meng-

hentikan aktivitas eksplorasi geotermal di wilayahnya. Pihaknya juga siap menerima kedatangan pihak Kementerian ESDM ke Kecamatan Padarincang dengan syarat Kementerian ESDM mencabut izin dan menghentikan seluruh aktivitas proyek. "Apa pun hasil kajian dari pemerintah, kami sudah mendengarkan kegiatan sosialisasi tanggal 18 Maret 2018, dan hasilnya seluruh elemen masyarakat menolak kehadiran PLTPB (pembangkit listrik tenaga panas bumi) tanpa kompromi dan negoisasi," tegasnya. (zai/ira)